

HASIL KLARIFIKASI LAPOR GUB

TanggalAduan : 26 Mei 2025
NomorAduan : LGWP26563366
UPPD : KabupatenCilacap
Tanggal Klarifikasi : 26 Mei 2025

IsiAduan

Pagi, Bapak Gubernur. Masyarakat Kroya menuntut realisasijanja Wakil Gubernur Taj Yasin: "BASMI PUNGLIJATENG!" "MANA BUKTINYA? Faktanya, praktik pungutan liar di SAMSAT Kroya, Kabupaten Cilacap, "SANGAT PARAH SEKALI!" Pungli di SAMSAT Kroya antara lain: 1) Beberapa bulan yang lalu, saya, Danny H. Siahaan, telah melaporkan kepada Gubernur mengenai sebuah kendaraan Innova putih 2014 dengan pajak yang tertera di STNK saat itu sebesar Rp. 3.769.500,-. Pemilik kendaraan merasa kebingungan mengenai prosedur mutasi, lalu meminta bantuan dari petugas SAMSAT Kroya (Petugas SK). Berikut adalah dialog antara pemilik Innova 2014 dan Petugas SK di kantor SAMSAT Kroya: * INNOVA 2014: "Berapa total biayanya?" * Petugas SK: "Kurang lebih 7,5 jutaan!" * INNOVA 2014: "Mengapa mahal, padahal ada pemutihan?" (Pada saat itu, pemutihan memberikan diskon bagi pembayaran pajak tepat waktu, bebas denda progresif, dan bebas BBN-KB II) * Petugas SK: "Kalau tidak ada pemutihan, bisa lebih dari 10 juta!" Setelah pembayaran selesai, total tagihan hampir mencapai 7,2 juta. Padahal, total pajak seharusnya kurang dari 3 juta. (Hal ini disebabkan oleh adanya pemutihan, tanpa tunggakan, dan pembayaran sebelum jatuh tempo). Setelah saya melaporkan kepada Gubernur, Petugas SK marah kepada pemilik Innova dan hanya mengembalikan Rp. 1.401.000,-. Seharusnya, yang harus dikembalikan adalah Rp. 7.100.000 - Rp. 3.000.000 = Rp. 4.100.000 (Rp. 2.699.000 ini merupakan nilai yang BELUM DIKEMBALIKAN!). Mohon kepada SAMSAT Kroya untuk segera mengembalikan kekurangan sebesar Rp. 2,5 juta (biarlah sisa tersebut digunakan untuk biaya pengurusan mutasi!). "Namun, JANGAN MARAH kepada pemilik Innova ini seperti sebelumnya!" 2) Pungli dalam peminjaman KTP, padahal dalam PP 60 tahun 2016 tidak ada ketentuan mengenai peminjaman KTP jika KTP pemilik sebelumnya tidak ada. 3) Pengurusan pajak 5 tahunan dengan penggantian plat yang sangat parah punglinya. Misalnya: motor dengan nilai pajak di STNK Rp. 299.000, harus membayar di muka sebesar Rp. 400.000 hingga Rp. 600.000. Bagaimana mungkin SAMSAT Kroya demikian parah? Masyarakat sampai berkomentar bahwa pungli sudah menjadi hal yang sah di Jateng. Masyarakat serentak siap untuk memviralkan pungli SAMSAT Kroya ini jika Pemprov tidak mengambil tindakan tegas. Mohon bantuannya untuk segera ditindaklanjuti dengan tegas. HILANGKAN PUNGLIJATENG. Saran: * Di SAMSAT, DUKCAPIL, kecamatan, dan kelurahan dipasang spanduk "ADUKAN PUNGLI lewat LAPORGUBJATENG di GOOGLE! atau WA ke No ADUAN PEMPROVJATENG." * Setiap SAMSAT sebaiknya diberikan pengawas dari KPK atau petugas lainnya.

JawabanAduan :

Terimakasih atas aduan yang telah disampaikan. Sebelum kami menginformasikan lebih lanjut, kami sampaikan bahwa aduan tersebut telah pernah diajukan diaduan Lapgub no LGWP20775313 pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diklarifikasi secara LANGSUNG dengan pemilik kendaraan tersebut dan telah dinyatakan jelas.

Hasil klarifikasi aduan terlampir sebagai berikut:

Aduan No LGWP 20775313 tanggal 7 Oktober 2024:

Selamat siang, Bapak PJGUBERNUR Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M.

Dengan hormat, saya memohon bantuan Bapak untuk memastikan bahwa SAMSAT beroperasi dengan integritas, tanpa adanya praktik pungutan liar. Seorang teman saya mengalami kebingungan dalam proses pengurusan cabut berkas, mutasi, dan balik nama kendaraan Toyota Innova G tahun 2014 berwarna putih dengan plat nomor R8586LH yang dimiliki oleh saudara Zainir dari Kroya.

Saat berurusan dengan Petugas SAMSAT Kroya, teman saya diminta untuk membayar sejumlah Rp. 4.500.000 di muka. Namun setelah proses selesai, terdapat tambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000. Teman saya menyatakan keheranannya atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan, mengingat adanya pemutihan. Namun, petugas SAMSAT Kroya menjelaskan bahwa tanpa pemutihan, biayanya dapat melampaui 10 juta.

Namun, ketika proses selesai, total biaya yang harus dibayarkan mencapai Rp. 7.200.000, jauh melebihi estimasi yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016. Biaya cabut berkas, mutasi, dan balik nama seharusnya sebesar Rp. 3.769.000. Mutasi keluar dari SAMSAT asal (Banyumas) sebesar Rp. 250.000, sedangkan mutasi masuk di SAMSAT tujuan (Cilacap) beserta pajak tahun berjalan sejumlah Rp. 3.769.500. Biaya untuk STNK sebesar Rp. 200.000, TNKB Rp. 100.000, dan BPKB Rp. 375.000, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.694.500. Uang yang diminta oleh oknum SAMSAT yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan harus segera dikembalikan sebesar Rp. 2.505.500. Saya memohon agar Bapak dapat mengunjungi kantor SAMSAT Kroya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

KlarifikasiAduan :

- . Sudah dilakukan klarifikasi langsung dengan pemilik kendaraan/wajib pajak dan yang bersangkutan tidak merasa melaporkan ke laporgub.
- . Sudah dijelaskan secara detail kepada wajib pajak tersebut untuk rincian biaya-biaya tidak seperti yang dilaporkan.
- . Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan terima kasih.



Cilacap, 26 Mei 2025
Kepala UPPD Kabupaten Cilacap



FATMAWATI, SE
NIP. 196410061994032004